KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPK Cokok Bupati PPU dengan Uang RP 1 M di Mal
Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

OPERASI TANGKAP TANGAN

KPK Cokok Bupati PPU dengan Uang Rp1 M di Mal

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (12/1). Dia terjerat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU).

"KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka ialah pemberi dari pihak swasta Ahmad Zuhdi, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Mereka semua diyakini bersekongkol dalam proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara . Dalam OTT ini, KPK menyita uang Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447 juta. "Serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Alex.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Kalimantan Timur. Tujuh orang ditangkap di Jakarta dan empat lainnya di Kalimantan Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Gafur yang merupakan salah satu kepala daerah termuda di Indonesia ditangkap di sebuah mal di Jakarta. Bupati kelahiran 7 Desember 1987 itu ditangkap beserta barang bukti berupa uang Rp1 miliar yang ditaruh di dalam koper.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini juga diamankan barang bukti, di antaranya uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya akan kembali dihitung dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terperiksa," jelasnya.

Bupati Penajam Paser Utara Terjaring OTT KPK

- Waktu penangkapan: Rabu, 12 Januari 2022
- Kasus: Dugaan suap dan/atau gratifikasi
- **Barang Bukti:**
  Uang tunai senilai Rp1 miliar dan saldo rekening bank senilai Rp440 juta.

Tersangka yang Ditetapkan KPK

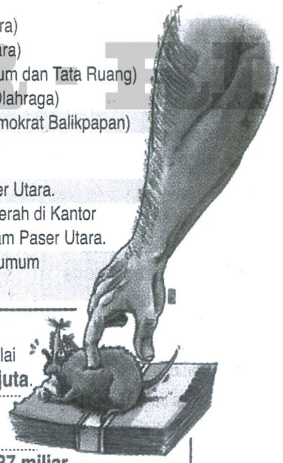
- Pemberi: **AZ** (swasta)
- Penerima:
  - **AGM** (Bupati Penajam Paser Utara)
  - **MI** (Plt Sekda Penajam Paser Utara)
  - **EH** (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
  - **JM** (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga)
  - **NA** (swasta, Bendahara DPC Demokrat Balikpapan)

Lokasi Penggeledahan

- Rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara.
- Ruang kerja bupati dan sekretaris daerah di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Ruang kerja kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Harta Kekayaan Abdul Gafur

- Memiliki 10 bidang tanah bernilai **Rp34,29 miliar**.
- Kas senilai **Rp546 juta**.
- Memiliki 3 mobil dan 1 motor yang bernilai **Rp509 juta**.
- Harta bergerak lainnya bernilai **Rp1,37 miliar**.



Sumber: KPK/LHKPN/Litbang MI/ Grafis: SENO

Di sisi lain, Partai Demokrat menghormati proses hukum terhadap Gafur yang juga merupakan Ketua DPC Demokrat Balikpapan.

"Secara prinsip kami sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi," kata Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto melalui keterangan tertulis, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa menegaskan proses hukum terhadap Gafur tidak mengganggu rencana pembanguan ibu kota baru negara termasuk pembahasan RUU IKN. "Insya Allah tidak ada gangguannya karena itu kan dua hal yang berbeda," tandasnya.

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan kasus ini merupakan dampak dari tingginya modal politik. Calon kepala daerah, mau tidak mau, harus merogoh kocek ratusan miliar hingga triliunan rupiah demi terpilih.

"Kalau korupsi melibatkan kepala daerah, lebih ke arah korupsi politik. Jadi korupsi yang dilakukan kepala daerah biasanya untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan atau untuk pengumpulan dana dalam rangka pemilu selanjutnya," paparnya. (Can/Cah/Uta/MGN/X-10)